

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMINKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Pemberitaan

Fungsi utama pemberitaan bukanlah untuk memperingatkan, menginstruksikan, dan membuat khalayak tercengang, tetapi memberitahu (Halsberstam 1992: 14). Setelah memberitahu khalayak, terserah khalayak untuk memanfaatkan sebuah berita. Tetapi, kalau sebuah berita hanya berhenti sampai memberitahu saja, maka berita itu disebut tidak bermanfaat bagi khalayak. Lalu, bagaimana caranya agar berita bisa bermanfaat untuk khalayak? Jawabnya ada dua, yaitu:

- a. Mengusahakan berita sebagai pengetahuan umum

Pengetahuan umum adalah pengertian-pengertian bersama tentang satu hal yang bisa dimanfaatkan khalayak untuk berinteraksi sosial. Bila seorang individu tidak memiliki pengetahuan umum, biasanya ia tidak berdaya dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok lain. Tidak heran kalau pengetahuan umum menjadi bagian yang penting dari kehidupan khalayak.

Pengalaman menunjukkan, bahan baku pengetahuan umum adalah informasi. Agar menjadi pengetahuan umum, informasi harus diinterpretasikan dan diberi konteks tertentu (Ericson, Baranek dan Chan 1987: 11). Sedangkan yang bisa digolongkan sebagai informasi antara lain: berita, laporan, data statistic, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan penting, resolusi. Kenyataan ini menimbulkan pendapat bahwa usaha menjadikan berita

menjadi pengetahuan umum bisa ditempuh dengan menginterpretasikan berita dan memberinya konteks tertentu.

Lalu, siapa yang harus menginterpretasikan berita dan memberinya konteks tertentu? Jawabnya, khalayak. Tetapi, para wartawan perlu merangsang khalayak untuk melakukan kedua hal itu, yaitu dengan menyiarkan berita yang memiliki nilai sosial dan yang menguntungkan kepentingan umum. Sebuah berita disebut menyiarkan berita yang memiliki nilai sosial kalau berita tersebut memenuhi kepentingan umum. Berita tentang pertengkaran suami-istri dan ulang tahun pejabat pemerintah misalunya, bukanlah berita yang memenuhi kepentingan umum.

Sedangkan berita disebut menguntungkan kepentingan umum, kalau berita tersebut tidak mendikte khalayak. Sebuah berita yang menyiarkan informasi yang berasal dari hanya satu narasumber jelas tidak menguntungkan kepentingan umum. Di samping khalayak tidak mendapatkan gambaran permasalahan dari berbagai pihak, khalayak seolah-olah dipaksa untuk mengikuti pendapat satu orang saja.

Kalau selama ini para pengamat menilai bahwa khalayak belum bisa menjadikan berita-berita yang disiarkan pers Indonesia sebagai pengetahuan umum, maka menjadi tantangan bagi pers Indonesia untuk menyiarkan berita yang memenuhi dan menguntungkan kepentingan umum. Andaikata pers Indonesia bisa menjadikan berita sebagai pengetahuan umum, pers Indonesia disebut telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi peningkatan daya nalar khalayak.

b. Mengusahakan berita sebagai alat kontrol sosial

Maksud berita sebagai alat kontrol sosial adalah: memberitakan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan ihwal yang menyalahi aturan, supaya peristiwa buruk tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Maka berita sebagai alat kontrol sosial bisa disebut □berita buruk.

Selama ini ada pendapat yang dianut oleh banyak orang bahwa □berita buruk□ akan melahirkan hal yang buruk pula. Misalnya: berita menyeluruh tentang gerakan Papua Merdeka dikhawatirkan akan mengancam persatuan nasional. Tetapi, akhir-akhir ini, di negara maju, berkembang pendapat bahwa □berita buruk□ justru melahirkan pelajaran yang baik untuk memperkuat nilai dan identitas kolektif yang sudah dimiliki (Ericson, Baranek dan Chan 1987: 65). Sebab, khalayak cenderung memproyeksikan keadaan yang mereka lihat pada diri mereka. Begitu mereka melihat kehidupan gerakan Papua Merdeka yang tidak enak dan tidak tentram, saat itu pula mereka tidak ingin meniru mereka.

Pada sisi yan lain, penyiaran □berita buruk□ tentang sebuah lembaga pemerintah bisa melahirkan opii publik yang baru dan citra yang baru pula tentang lembaga pemerintah tersebut. Walaupun begitu, ia bisa merangsang gagasan-gagasan dari khalayak untuk ikut membantu memperbaiki lembaga pemerintah tersebut. Kalau berita itu tidak disiarkan, bukan mustahil gagasan-gagasan khalayak untuk memperbaiki lembaga tersebut tidak muncul.

Bagi individu yang terlibat langsung dalam sebuah □berita buruk□ penyiaran beritanya akan membuat ia selalu ingat bahwa khalayak tahu ia pernah teledor dan khilaf. Ingatan ini akan membuatnya berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini dimungkinkan karena sesungguhnya seorang individu akan merasa gundah dan resah bila khalayak tahu ia pernah berbuat salah.

Kalau selama ini ada kekhawatiran bahwa berita sebagai kontrol sosial akan meresahkan khalyak dan merugikan kepentingan umum, kenyataan di atas menimbulkan pendapat bahwa berita sebagai kontrol sosial lebih banyak mendatangkan keuntungan dari pada kerugian. Salah satu keuntungan itu adalah merangsang timbulnya gagasan-gagasan khalayak ([https://aliefnews.wordpress.com/2008, 01, 11\)](https://aliefnews.wordpress.com/2008/01/11/))

2.1.2 Konsep Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam Kamus Al-Munawwir, korupsi bisa diartikan meliputi: risywah, khiyanat, fasad, ghulul, suht, bathil. Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata korupsi diartikan kedalam bahasa arab: risywah, ihtilas, dan fasad. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk,

rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Sementara, disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Defenisi lain tentang korupsi, adalah sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, at aupun simbol.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Sebenarnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber :

a. Syed Husein Alatas

Menurut pemakaian umum, istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai “korupsi”. Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik.

b. David H. Bayley

Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkahlaku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).

Jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyuapan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Dan tidak hanya dalam bentuk uang. Hal ini secara baik sekali dikemukakan oleh sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi: dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.

c. Sudomo

Sebenarnya pengertian korupsi ada tiga, pertama menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri, kedua, menyalahgunakan wewenang, *abuse of power*. Wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Yang ketiga adalah pungutan liar. Pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan warga setempat, yang maksudnya si-oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya, dan oknum warga masyarakat tertentu

memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan (Miftah; 2014 ,14-19).

2.1.3 Konsep E-KTP

Kartu tanda penduduk elektronik atau elektronik KTP (e-KTP) adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik dan penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP di luncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan february 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 april 2012 yang mencapai 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten, kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP.

Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia, fakta tersebut memberi peluang pada penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal tertentu dengan menggandakan KTP nya..

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintah elektronik (e-government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. E-ktip atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan /pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi

informasi dengan berbasis pada data base kependudukan normal, penduduk hanya dibolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar penerbitan paspor, nomor pokok wajib pajak, surat izin mengemudi, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Autentikasi kartu identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan ciri ini, di antara lain sidik jari (finger print), retina mata, DNA, bentuk wajah dan bentuk gigi. Pada e-KTP sistem yang digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM. Sidik jari tidak sekedar di cetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti yang ada pada SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu (Akmal; 2013,31-32).

2.1.4 Konsep Media Massa

Dalam pandangan positivisme, media massa dipahami sebagai alat penyalur pesan. Media massa sebagai sarana untuk bagaimana pesan disebarkan dari komunikator (wartawan, jurnalis) kepada khalayak (pendengar, pembaca) media massa benar-benar di anggap sebagai alat netral, yang hanya mempunyai tugas utama sebagai alat penyalur pesan. Dan juga di pandang tidak memiliki kepentingan, maksud, ataupun tujuan lain. Dan jika media tersebut menyampaikan

peristiwa atau kejadian, maka yang disampaikan itu adalah realitas yang sebenarnya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi.

Namun berbeda dengan pandangan konstruktifisme, media massa di pahami sebaliknya. Media massa bukan hanya di anggap sebagai alat penyalur pesan, akan tetapi media massa juga di anggap sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Pada pandangan konstruktivisme ini, media massa di pandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefenisikan realitas (Bonnet , 1982 ;287-288)

Pandangan konstruktifisme ini menolak argumen yang menyatakan bahwa media sebagai tempat saluran yang bebas. Berita yang di baca dan di dengar oleh khalayak bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan sumber berita, tetapi juga ada konstruksi dari media itu sendiri, dimana media mengkontruksi lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media itu membentuk realitas yang terkemas dalam pemberitaan. Apa yang di baca dan di dengar oleh khalayak setiap harinya adalah produk dari konstruksi realitas dari pada media itu sendiri. Dimana media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk di sajikan kepada khalayak. Dan juga media mengkonstruksikan realitas dengan cara memilih kejadian mana yang patut diekspos sebagai bahan berita dan mana yang tidak patut. Media juga memilih orang atau tokoh sebagai sumber berita berdasarkan kriterianya sendiri, sehingga hasil pemberitaannyapun cenderung sepihak.

Dengan demikian media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melaikan juga mendefenisikan peristiwa dan sumber berita. Lewat

pemberitaan media dapat membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu. Dan kemudian peristiwa yang telah terbingkai itulah yang di dengar dan di baca oleh klayak. Dan khalayak pun tidak dapat melihat peristiwa atau kejadian tersebut dengan bingkainya sendiri.

Suatu berita yang di sajikan oleh suatu institusi media massa (surat kabar, majalah, tabloid, radio, atau televisi) bukan fakta yang sebenarnya, tetapi merupakan “ fakta semu “ yang telah di rekayasa oleh institusi penyiar berita tersebut. Di dalam percaturan opini publik, masalah pokoknya adalah bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, tetapi apa yang mereka anggap sebagai fakta. Jadi, ada kesenjangan antara fakta sebenarnya dan “apa yang di anggap sebagai fakta” yang oleh Lippmann disebut sebagai “ kenyataan fatamorgana “ atau lingkungan palsu. (HUSAINI, 2002 ; xix)

2.1.5 Konsep Konsturksi Sosial

Teori yang dikembangkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman ini berpandangan bahwa realitas memiliki dimensi dimana dimensi tersebut adalah dimensi subjektif dan objektif. Dimana manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagai mana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektif. Dengan demikian, masyarakat sebagai produk manusia, dan manusia sebagai produk masyarakat, yang keduanya berlangsung secara dialektis, tesis, antitesis dan sintetis. Kedialektisan tersebut sekaligus menandakan bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi tetap sebagi proses yang

sedang terbentuk. Manusia sebagai individu sosial pun tidak pernah stagnan selama ia hidup di tengah masyarakat (Muslich, 2008 ; 151).

Secara teknis, tesis utama Berger dan Luckman adalah manusia dan masyarakat merupakan produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Ia bukan realitas tunggal yang statis dan final, melainkan merupakan realitas yang bersifat dinamis dan dialektis. Realitas bersifat plural ditandai dengan adanya relativitas seseorang ketika melihat kenyataan dan pengetahuan.

Masyarakat adalah produk manusia namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia juga produk masyarakat. Seseorang atau individu menjadi pribadi yang beridentitas jika ia tetap tinggal dan menjadi entitas dari masyarakatnya. Proses dialektis itu, menurut Berger dan Luckman (dalam Eriyanto, 2002 : 14-19), mempunyai 3 momen, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

a). Eksternalisasi yang dimaksud adalah usaha ekspresi diri manusia ke dalam dunia luar, baik kegiatan mental maupun fisik. Momen itu bersifat kodrati manusia, ia selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Ia ingin menemukan dirinya dalam suatu dunia, dalam suatu komunitas, dan itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Sejak lahir, bahkan sejak masa foetal, binatang sudah menyelesaikannya. Tetapi, perkembangan manusia agar disebut “manusia” belum selesai pada dilahirkan. Manusia perlu berproses dengan cara berinteraksi dengan lingkungan dan mereaksinya terus menerus baik fisik maupun non fisik, sampai manusia itu remaja, dewasa, tua dan mati. Artinya, selama hidup

manusia selalu menemukan dirinya dengan jalan mencurahkan dirinya dalam dunia.

b). Objektifikasi adalah hasil yang telah di capai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Hasilnya berupa realitas yang objektif yang terpisah dari dirinya. Bahkan, realitas objektif yang di hasilkan berpotensi untuk berhadapan dan bahkan mengendalikan dengan sipenghasilnya. Misalnya, dari kegiatan eksternalisasi manusia menghasilkan alat demi kemudahan hidupnya. Cangkul untuk meningkatkan pengolahan pertanian. Atau bahasa untuk melancarkan komunikasi. Kedua produk itu diciptakan untuk menghadapi dunia. Setelah di hasilkan, kedua produk itu menjadi realitas yang objektif (objektifikasi). Ia menjadi dirinya sendiri, terpisah dengan individu penghasilnya, bahkan dengan logikanya sendiri, ia bisa memaksa penghasilnya.

Realitas objektif cangkul bisa menentukan bagaimana petani harus mengatur cara kerjanya. Ia secara tidak sadar telah didikte oleh cangkul yang di ciptakannya sendiri. Begitu juga bahasa, cara pikir manusia akhirnya di tentukan oleh bahasa yang di ciptakan nya sendiri. Bahkan, mereka bisa bersengketa dan berperang karna bahasa. Realitas obketif itu berbeda dengan kenyataan subjektif individual, realitas objek menjadi kenyataan empiris. Bisa dialami oleh setiap orang dan kolektif.

c). Internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran. Subjektif sedemikian rupa sehingga individu di pengaruhi oleh struktur sosial atau dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah

terobjektifkan tersebut akan di tangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, dan sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran.

Melalui internalisasi itu, manusia menjadi produk masyarakat. Salah satu wujud internalisasi adalah sosialisasi bagaimana suatu generasi menyampaikan nilai-nilai dan norma-norma sosial (termasuk budaya) yang ada kepada generasi berikut. Diajar (lewat berbagai kesempatan dan cara) untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mewarnai struktur masyarakatnya. Generasi baru di bantu oleh makna-makna yang telah di objektifikasikan. Generasi baru mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai tersebut. Mereka tidak hanya mengenalnya tetapi juga mempraktikannya dalam segala gerak kehidupannya.

Berger dan Luckman berpandangan bahwa realitas tidak di bentuk secara ilmu. Juga tidak di turunkan oleh tuhan. Sebaliknya realitas itu di bentuk dan di konstruksikan manusia. Pemahaman itu menyiratkan bahwa realitas berpotensi berwajah ganda dan plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, referensi, tingkat pendidikan, lingkungan atau pergaulan sosial tertentu akan menafsirkan atau memaknakan berdasarkan konstruksinya masing-masing (muslich, 2008 ; 151-152).

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

➤ Berdasarkan kutipan jurnal Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial menjelaskan bahwa, Institusi sosial dipelajari oleh konstruksi sosial termasuk agama, keluarga, pernikahan, gender, "sakit" psikologis dan lain sebagainya. Dari perspektif konstruksi sosial, dapat dijelaskan bahwa itu tidak

mungkin bagi seseorang untuk menghapus fenomena yang terjadi dimasyarakat, dan proses internalisasi mungkin bisa memberi pengaruh kepada seseorang.

Kemampuan dalam menentukan berat atau ringannya keberadaan sifat dari karakteristik dan Fenomena yang ada dengan proses eksternalisasi itu sendiri akan membentuk realitas obyektif. Dalam proses ini seseorang dapat menempatkan dirinya dalam pandangan dunia intersubjektif. Dimana dalam pandangan dunia yang bisa menghasilkan proses adalah objektivitas pada suatu proses yang bermakna subjektif (ngangi : 2011,1).

➤ Dikutip dari jurnal riset penggunaan media dan penggunaannya menyebutkan bahwa: *Uses-and-gratifications (U & G)* merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Teori yang awalnya dikembangkan Kazt dan Gurevic memiliki banyak perkembangan khususnya pada konsep gratifikasinya.

Perkembangan yang pesat ini muncul setelah berkembangnya media baru atau internet. Tulisan ini mengkaji *state of the art* teori tersebut pada 13 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa teori tersebut sering dijadikan teori inti dalam kajian penggunaan media. Adakalanya beberapa penelitian memadukan teori tersebut dengan Teori *Media Dependency*. Kendatipun berbeda dalam hal asumsi dan konsepnya, kedua tersebut memiliki kesamaan dalam hal titik fokusnya yang memusatkan kajian pada khalayak, dan sama dalam hal tradisi teorinya yaitu sosio-psikologis. Konsep gratifikasi teori ini cenderung semakin beragam. Media yang memenuhi kebutuhan khalayak mengalami perkembangan

dari media tradisional ke media baru (*internet*), bahkan ke aplikasi tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei (acapkali didukung juga dengan pendekatan kualitatif). Survei yang dilakukan umumnya sudah lazim dilakukan secara *online* (karman:2013,93).

➤ Kutipan dari jurnal profesional FIS UNITED Vol.4 No. 1 Juni 2017 dengan judul analisis semiotika sosial pemberitaan kasus korupsi e-ktp pada situs liputan 6.com menjelaskan bahwa: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berita kasus korupsi E-KTP yang dilaporkan oleh Liputan6.com, dalam melaporkan kasus korupsi E-KTP card adalah kasus yang sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu diteliti oleh KPU dan belum teratasi hingga saat ini. dan memiliki 2 (dua) orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan banyak saksi yang telah diperiksa oleh proyek pengadaan graft Komisi E-KTP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Domain Wacana, Wacana Mata Kuliah dan Alat Wacana dalam melaporkan kasus korupsi E-KTP di situs Liputan6.com. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif MAK Halliday pendekatan semiotika sosial dalam mendefinisikan teks suatu berita dan menelaah sistem tersebut dalam bentuk bahasa isyarat yang dihasilkan oleh manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga konteks yang berbeda, yaitu Domain Wacana, Wacana Mata Kuliah dan Wacana Alat. Dalam Domain Wacana itu dibuat kata-kata Nazaruddin yang mengungkap ada aliran dana proyek kartu E-KTP ke partai politik tertentu yang duduk di DPR.

Tujuannya segera adalah orang-orang atau pembaca tahu bahwa kasus ini adalah kasus besar dan sulit yang ditangani oleh KPK hari ini. Tujuan jangka panjang adalah berita ini atau ditempatkan di situs media online sehingga orang dapat membaca kapan saja dan di mana saja.

Wacana Subjek di newsthat ini adalah Nazaruddin, Novanto, Febri Diansyah, Sugiharto, Ganjar Pranowo, Markus Nari, Chairuman Harahap, Junaidi, Elza Syarif, Basaria Panjaitan, dan Irman. Peran mereka ada saksi, tersangka, juru bicara dan pengacara. Beberapa jarak sosial di antara mereka yang memiliki jarak dan nada; yang lain memiliki hubungan seperti Nazaruddin, Novanto, Ganjar Pranowo, Chairuman Harahap, dan Markus Nari telah bekerja sebagai anggota Komisi II DPR.

Irman, Sugiharto, dan Junaidi keduanya bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Febri Diansyah dan Basaria Panjaitan adalah juru bicara KPK. Elza syarif adalah pengacara Nazaruddin. Selanjutnya wacana alat dalam gaya bahasa berita yang digunakan adalah Eufisme, Apronim, Apofasis, Majas Tautology, Kontradiksi Minus Dan Ellipsis. Jenis interaksi apa yang bersifat dialogis. Media yang digunakan adalah menulis.

Bentuk visual Channels karena cerita ini ditulis, dan hanya bisa dilihat. Mode retorik yang digunakan bersifat persuasif karena bertujuan untuk mempengaruhi sikap masyarakat dan pembaca untuk selalu mengikuti berita (Sari, Risdianto, Sari: 2017, 87)

➤ Mengutip dari tilisan Fatimah Choirinisa dengan judul Analisis pemberitaan kasus korupsi proyek e-ktip pada surat kabar harian Kompas

menyebutkan bahwa kasus korupsi e-ktip adalah salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya nilai penyimpangan dana dalam proyek e-ktip mencapai RP 2.31 triliun. Selain itu publik juga dikejutkan dengan penyebutan nama-nama besar yang terlibat dalam kasus korupsi e-ktip ini.

Seperti ketua dpr Setya Novanto, mantan ketua dpr Marzuki Ali, dan mantan menteri dalam negeri yang mendapat predikat anti *corruption award* Gamawan Fauzi. Hal tersebut menjadi faktor mengapa media massa gencar memberitakan tentang kasus korupsi e-ktip. Dan Kompas salah satu media yang gencar memberitakan kasus korupsi e-ktip, ini menunjukkan adanya penonjolan aspek-aspek tertentu yang ingin disampaikan oleh media Kompas melalui pemberitaannya (choirinisa: 2017, iv)

2.3 Teori

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teori News Making Criminology yang di pelopori oleh Greek Barrak :

2.3.1 Newsmaking Criminology

Kemunculan *Newsmaking Criminology* sebagai bidang kajian dalam kriminologi menurut Gregg Barak (1988) salah satunya di latar belakang oleh adanya tuntutan untuk keterlibatan aktiv kriminolog, (orang yang mendalami tentang kriminologi) didalam pembentukan “realitas” pemberitaan media massa yang sering mengalami pengecoh atau tidak proporsional dengan realitas sebenarnya. Pembentukan yang tidak mengungkap realitas seperti kenyataan di masyarakat tentang seriusitas kejahatan, tipologi kejahatan yang paling banyak

terjadi di masyarakat, penciptaan *image* yang tidak tepat tentang kejahatan dan penjahat, penggunaan terminologi yang tidak tepat, serta pemberitaan yang melanggar hukum dan etika pers.

Dalam konteks inilah Gregg Barak memberikan suatu kerangka alternatif yang kemudian di sebut dengan *Newsmaking Criminology*. Tujuan akhir dari *Newsmaking Criminology* menurut Gragg Barak adalah mempengaruhi kebijakan publik terkait dengan kejahatan dan peradilan pidana melalui peningkatan mutu pemberitaan peristiwa-peristiwa kejahatan (Barak;1994 ,237-238).

Newsmaking Criminology bertolak belakang dari paradigma realis dalam kriminologi, paradigma realis dalam halini setidaknya menekankan dua hal, yaitu holistisitas, sebuah kajian dan kegunaan dari kajian itu sendiri. Aspek holistik dari sebuah kajian terkait dengan analisis yang tidak dapat hanya di dasarkan atas satu faktor penjas saja. Terjadinya peristiwa akan terkait dengan banyak faktor. Dalam kaitannya dengan peliputan pemberitaan, terjadinya suatu peristiwa kejahatan tidak dapat hanya di dasarkan atas “analisis” yang diberikan oleh polisi. Lebih dari itu, media massa harus mendapatkan informasi dari sumber-sumber lain, termasuk melakukan observasi. Dalam kriminologi realis, dimana dinamika faktor-faktor tersebut berada dalam suatu struktur sosial, ekonomi, politik tertentu.

Sementara aspek kegunaan dari kajian dalam paradigma realis di dasarkan atas prinsip merubah dunia yang lebih baik. Banyak orang yang menguasai filsafat atau teori, namun tidak banyak yang melakukan perubahan dengan kemampuan analisisnya. *Newsmaking Criminology* dalam konteks ini dapat di sebut sebagai teori kritis dalam pemberitaan media dan panduan untuk membuatnya lebih baik.

Namun *Newsmaking Criminology* tidak berhenti hanya sebagai pemberi kritik atau upaya dekonstruktif terhadap wacana tentang kejahatan yang tidak proporsional. inilah mengapa Gregg Barak menjadikan konstitutif kriminologi menjadi salah satu dasar dari *Newsmaking Criminology*.

Hery dan Milovanovic (mustofa;2007) mengatakan kriminologi konstitutif merupakan pemikiran kriminologi yang matang. Memahami kejahatan harus di pertimbangkan sebagai hasil akhir dari wacana (diskursus) yang dilakukan manusia dalam mempertahankan ideologi bahwa kejahatan adalah realitas yang kongkrit. kriminologi konstitutif mempromosikan pembentukan dunia melalui interaksi dan melalui wacana, kejahatan dalam hal ini adalah kekuasaan untuk mengabaikan yang lain, yang di produksi berulang-ulang secara historis sebagai wacana budaya (Sulhin;2007 ,4-5).

Kemudian untuk memperkuat hasil penelitian ini penulis menggunakan teori Agenda Setting Model sebagai green teori :

2.3.2 Agenda Setting Model

Teori penataan agenda (Agenda Setting Model) adalah teori yang menyatakan bahwa media merupakan pusat penentuan kebenaran. Dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua element yaitu kesadaran dan informasi kedalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya pada isu-isu yang di anggap penting oleh media massa.

Teori Agenda Setting pertamakali dikemukakan oleh Welter Lippman (1963) pada konsep “ *the world outside and the picture in our head* “ penelitian empiris teori ini dilakukan Mc Combs dan Shaw ketika mereka meneliti

pemilihan presiden pada tahun 1972. Mereka mengatakan. Walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat konvensional, belakagn mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita.

Agenda Setting Model (model penataan agenda) menghidupkan kembali model jarum hipodermik, tetapi fokus penelitian telah bergeser dari efek pada sikap dan pendapat kepada efek kesadaran dan efek pengetahuan. Asumsi dasar teori ini ,menurut Cohen (1965) adalah : *The press is significantly mare than a surveor of information and opinion. It may not be successful much of the time in telling readers what to thing about. To tell what to thing about* artinya membentuk presepsi khlayak tentang apa yang di anggap penting. Dengan teknik pemilihan atau penonjolan, media memberi *test case* tentang isu yang lebih penting. Asumsi Agenda Seting Model ini mempunyai kelebihan karna mudah untuk diuji. Dasar pemikirannya adalah di antara berbagai topik yang dimuat media massa akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya, akan dianggap penting dalam satu periode waktu tertentu, dan akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media massa. Oleh karna itu.Agenda Seting Model menekankan adanya hubungan positif antara penilaian yang di berikan media massa pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak pada persoalan tersebut. Dengan kata lain, apa yang di anggap penting oleh media, akan di anggap penting

pula oleh masyarakat. Apa yang dilupakan media, akan luput juga dari perhatian masyarakat.

Efek dari Agenda Setting Model terdiri atas efek langsung dan efek lanjutan (*subsequent effects*). Efek langsung berkaitan dengan isu: apakah isu itu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak; dari semua isu, mana yang paling di anggap penting menurut khalayak; sedangkan efek lanjutan berupa persepsi (pengetahuan tentang peristiwa tertentu) atau tindakan seperti memilih kontestan atau aksi protes. Hampir semua penelitian menggunakan Agenda Setting Model berkenaan dengan efek media massa dalam bidang politik. Shaw & McCom melakukan study empiris pertama yang meneliti kampanye Presiden Amerika tahun 1972. Penelitian ini menemukan bahwa surat kabar turut menentukan apa yang di anggap penting oleh masyarakat.

Dengan kata lain, media massa menetapkan agenda kampanye tersebut. Kemampuan untuk memengaruhi perubahan kognitif individu ini merupakan aspek terpenting dari kekuatan komunikasi massa. Dalam kampanye, model ini mengasumsikan bahwa jika para calon pemilih dapat diyakinkan akan pentingnya suatu isu, maka mereka akan memilih kandidat atau partai yang di proyeksikan paling berkompeten dalam menangani isu tersebut. Pengaruh media massa terasa lebih kuat lagi pada masyarakat modern, karna orang banyak memperoleh banyak informasi tentang dunia dari media massa. Pada saat yang sama mereka sukar mengecek kebenaran yang di sajikan media massa.

Di kalangan wartawan di kenal dengan apa yang disebut *investigative reporting* (pelaporan penyelidikan). Dalam halini, wartawan berusaha

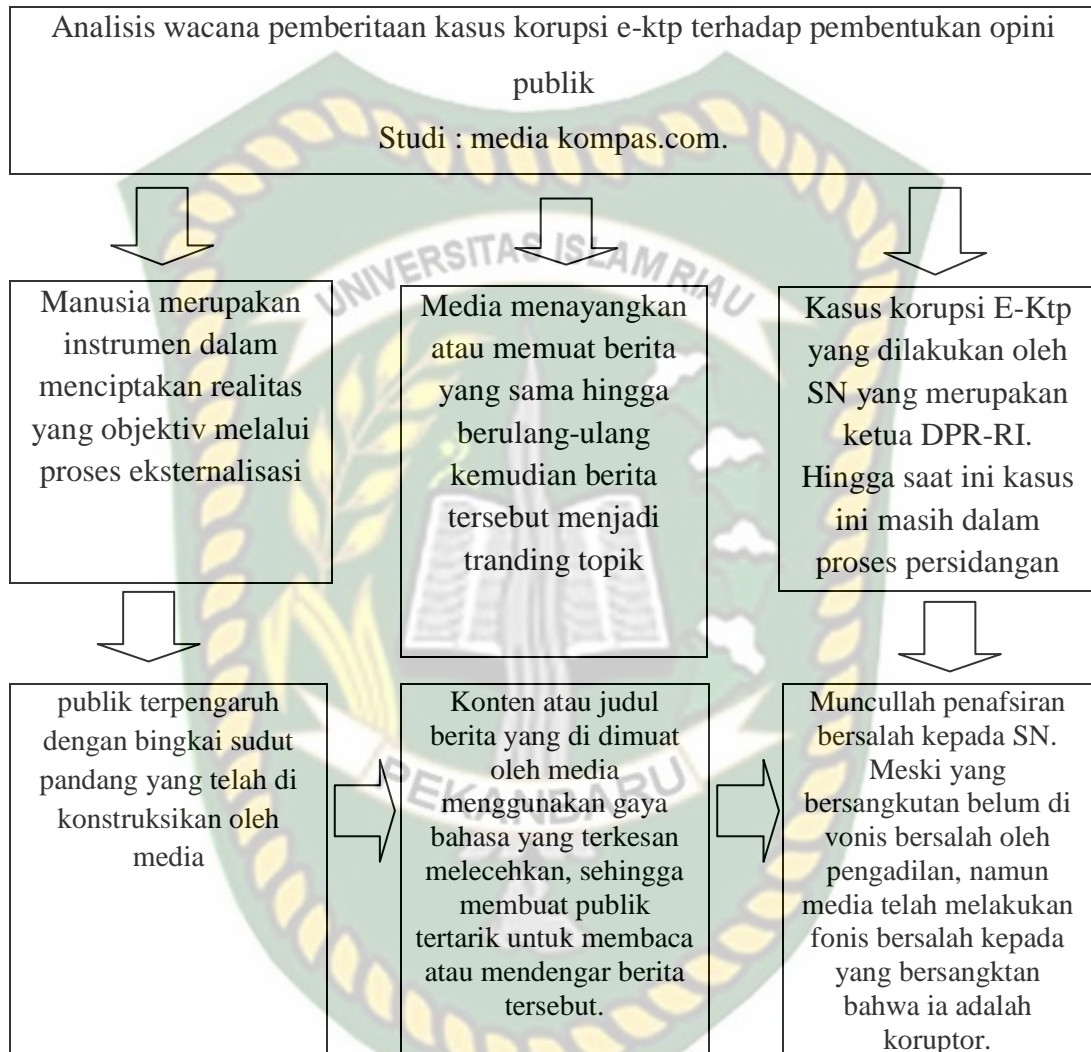
mengungkapkan penyelewengan, korupsi dan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Laporan seperti itu sangat menentukan dalam mengubah citra, yang akan di susul dengan serangkaian perilaku. Namun, belum tentu juga apa yang di kemukakan oleh wartawan itu benar-benar terjadi. Orang tidak punya waktu untuk menyelidik kebenarannya, sedangkan tindakan itu tidak dapat di tangguhkan (Ardianto & komala; 2007, 76-77).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.4 Model Kerangka pemikiran analisis wacana pemberitaan kasus korupsi e-ktp terhadap pembentukan opini publik



Sumber : modifikasi penulis 2018

2.5 konsep operasional

Adapun konsep – konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Menurut Purnama Kusumaningrat (2005:39) Berita merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan. Biasanya subjek pemberitaan merupakan sesuatu atau seseorang yang memang sedang di sorot atau diperhatikan oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu media akan menjadikan topik utama dalam suatu berita.
2. Korupsi adalah tingkahlaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan negara karna keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Kartayasa; 2017,14).
3. E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Masrin; 2013,74)
4. Purnamawati dan Eldarni (2001), Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar (www.e-jurnal.com.2013,12)

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata. (Alwi, hasan. 2007.) Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan (Suwandi, Sarwiji. 2008.)

